

# **ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KUDUS DALAM PENGELOLAAN DRAINASE SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN BANJIR**

**Putri Theresia, R. Slamet Santoso**

Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## **ABSTRACT**

*Flooding and waterlogging remain ongoing problems in Kudus Regency. These issues indicate that the measures taken to address them have not been fully effective, necessitating an evaluation and improvement of the drainage management system as well as coordination among relevant agencies. The Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Kudus Regency is the government agency responsible for infrastructure development, including drainage system management. The objective of this study is to analyze and describe the performance of the Public Works and Spatial Planning Department of Kudus Regency, as well as the factors influencing performance in drainage management. The research method used is a qualitative descriptive approach. This study uses Agus Dwiyanto's organizational performance theory, which includes productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The factors influencing performance are viewed from personal factors, leadership factors, team factors, and system factors. The results of the study show that responsiveness and responsibility have been optimal, but productivity in drainage management has not been maximized because there are still drainage points that have not been built. Service quality in drainage management has not been optimal. Accountability still needs to be improved, especially regarding the presentation of the latest information. Performance barriers include budget constraints, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness. Meanwhile, leadership, personal factors, and teamwork are performance drivers. The researcher recommends that the PUPR office improve the supervision and monitoring system for drainage channels. Information updates can be done by setting a regular schedule and assigning a specific person in charge, as well as making efforts to raise public awareness through socialization and the use of information media.*

**Keywords: Organizational Performance, Drainage Management, Flooding**

## **ABSTRAK**

Genangan dan banjir merupakan permasalahan yang masih terjadi di Kabupaten Kudus. Masalah ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan pada sistem pengelolaan drainase serta koordinasi antar instansi terkait. Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur termasuk pengelolaan sistem drainase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus serta faktor yang mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan drainase. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi Agus Dwiyanto meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dilihat dari faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim dan faktor sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas dan responsibilitas telah berjalan optimal, produktivitas kinerja dalam pengelolaan drainase belum maksimal karena masih terdapat titik-titik drainase yang belum terbangun. Kualitas layanan dalam pengelolaan drainase belum berjalan optimal. Akuntabilitas masih perlu ditingkatkan terutama terkait penyajian informasi terbaru. Faktor penghambat kinerja adalah keterbatasan anggaran, kekurangan sarana dan prasarana dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan kepemimpinan, faktor personal, dan tim menjadi faktor pendorong kinerja. Peneliti memberikan saran agar dinas PUPR meningkatkan sistem pengawasan dan monitoring pada saluran drainase. Pembaruan informasi dapat dilakukan dengan menetapkan jadwal rutin dan penanggung jawab khusus, serta perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pemanfaatan media informasi.

**Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Pengelolaan Drainase, Banjir**

## PENDAHULUAN

Indonesia terletak pada koordinat 6°LU- 11° LS dan 95° BT - 141°45 BT yang menjadikan Indonesia beriklim tropis sehingga memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada bulan Oktober hingga Maret Indonesia mengalami musim hujan sehingga menyebabkan beberapa daerah di Indonesia rawan mengalami bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Data jumlah bencana alam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 yang dilansir dari laman website BPBD mencatat telah terjadi 947 kejadian bencana alam di Jawa Tengah. Berdasarkan total keseluruhan kejadian bencana tersebut, banjir menjadi bencana alam kedua yang sering terjadi yaitu sebanyak 132 kali.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang

rentan terhadap ancaman terjadinya bencana alam. Pada periode Januari hingga Desember 2023 terlihat Kabupaten Kudus telah mengalami 60 kejadian bencana alam. Jika dilihat secara topografi, wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari daerah pengunungan dan dataran rendah. Kondisi ini membuat wilayah Kabupaten Kudus rentan terjadi bencana alam diantaranya yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran lahan.

Tabel 1  
Data Bencana Alam di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Jenis Bencana					Total
	Kejadian Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Puting Beliung	Kekeringan	
2019	167	28	9	9	–	274
2020	38	35	29	5	2	205
2021	46	40	21	72	0	257
2022	65	17	41	87	0	348
2023	195	122	36	30	19	402
<b>Total</b>	<b>511</b>	<b>242</b>	<b>136</b>	<b>203</b>	<b>21</b>	<b>1486</b>

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel diatas tentang data bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus

tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi sehingga menempati peringkat kedua dengan 242 kejadian di sepanjang tahun 2019-2023.

Saluran drainase adalah salah satu bagian penting dari infrastruktur publik khususnya di wilayah perkotaan yang berperan penting dalam mendukung kenyamanan, keamanan, dan kesehatan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Drainase yang terletak di wilayah perkotaan biasanya dibangun di sepanjang sisi jalan dengan tujuan untuk mengalirkan air menuju lokasi yang lebih rendah. Namun dalam situasi tertentu, saluran drainase ini dapat mengalami penyumbatan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan lembaga di tingkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah pusat yang kehadirannya diharapkan dapat mendorong transformasi pelayanan publik pada arah yang lebih baik. Dinas PUPR merupakan instansi daerah yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan tugas dalam menjalankan otonomi daerah pada sektor pekerjaan umum (Sameldi, 2020).

Dinas PUPR bidang Tata Bangunan dan Drainase berkewajiban untuk memfokuskan upaya pada pemeliharaan, perawatan, serta pemeriksaan rutin terhadap infrastruktur guna menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang mengatur pentingnya pemeliharaan drainase sebagai bagian dari keberlanjutan fungsi infrastruktur publik.

Dinas PUPR memang menjadi instansi teknis utama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas sistem drainase sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari sektor lain dalam pengelolaan drainase.

Berdasarkan adanya permasalahan yang telah dijelaskan menjadi data awal bahwa kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam upaya pengelolaan drainase sebagai langkah pencegahan banjir masih

belum maksimal dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dibuktikan dengan data yang dihimpun dari BPBD yang menunjukkan masih tingginya bencana banjir di Kabupaten Kudus pada awal tahun 2023 yang sudah mencapai 122 kejadian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola drainase di Kabupaten Kudus, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, judul yang diambil sebagai judul dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase sebagai Strategi Pencegahan Banjir.”

## **KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Istilah “administrasi” menurut pendapat (A. Dunsire dalam Keban, 2019) diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, kegiatan menganalisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan. Menurut (Keban, 2019) publik diartikan sebagai mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah.

Menurut (Chandler dan Plano dalam Keban, 2019) administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya dalam lembaga publik yang bertujuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

### **Manajemen Kinerja**

Manajemen kinerja adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan kinerja, pemantauan atau evaluasi kinerja, penilaian hasil kerja serta tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman (Bahiroh, 2024). Kinerja berperan sebagai penghubung yang menyatukan berbagai kegiatan organisasi dalam menjalankan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun jenis kinerja terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

#### **1. Kinerja Program**

Kinerja program merujuk pada efektivitas suatu program atau proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **2. Kinerja Organisasi**

Kinerja organisasi mengacu pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

### 3. Kinerja Individu

Kinerja individu berkaitan dengan pencapaian atau performa seseorang individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan dalam suatu pekerjaan.

## **Pengukuran atau Penilaian Kinerja Organisasi**

Menurut Leilasariyanti (2025) pengukuran kinerja merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana pencapaian target telah selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. (Whittaker dalam Ferine, 2024) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja berfungsi sebagai instrumen manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Terdapat berbagai macam dimensi dalam pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu salah satunya menurut Agus Dwiyanto. Buku berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia yang ditulis oleh (Dwiyanto et al., 2012) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik diantaranya yaitu:

#### 1. Produktivitas

Produktivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pelayanan. Konsep produktivitas dapat diartikan juga sebagai seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan.

#### 2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan mengukur tentang bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi publik.

#### 3. Responsivitas

Menurut (Dwiyanto et al., 2012) responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda prioritas pelayanan, serta merancang program-program pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam organisasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi serta misi dari organisasi (Adisasmita dalam Grasia et al., 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, agar peneliti dapat menggali dan menganalisis data dengan mendalam. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau kedalaman data yang dapat diperoleh. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif, yang membantu dalam menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti dengan rinci dan mendalam.

Teknik *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini untuk memilih subjek yang sesuai berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik yang menggunakan sedikit sumber data dalam pengambilan sampel dan mengalami perkembangan seiring proses pengambilan data (Sugiyono, 2022).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif terdiri dari kata-kata atau kalimat yang memiliki definisi yang jelas. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen

seperti LKjIP, artikel jurnal, dan data yang diperoleh dari website Dinas PUPR. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis interpretasi data yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan drainase adalah analisis data Model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas PUPR Kabupaten Kudus merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, dan penataan ruang di Kabupaten Kudus. Dinas PUPR bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan berbagai program pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat. Bidang Tata Bangunan dan Drainase memiliki tugas

dan tanggungjawab terhadap pengelolaan drainase.

Penelitian tentang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase sebagai strategi pencegahan banjir didukung oleh data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian ini menjawab bagaimana kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus serta dan apa saja faktor pendorong dan penghambat kinerja Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase.

## **Kinerja Dinas PUPR dalam Pengelolaan Drainase sebagai Strategi Pencegahan Banjir**

### **1. Produktivitas**

Nangoy et al (dalam Afrizal et al., 2021) menyatakan bahwa produktivitas merupakan suatu sikap mental yang berfokus pada pandangan bahwa keadaan saat ini harus lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Pembahasan dalam produktivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang pertama adalah berkaitan tentang efektivitas kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan

efektivitas penanganan banjir dengan pengelolaan drainase, khususnya di wilayah perkotaan yang berada di ruas jalan kabupaten. Penanganan drainase sendiri terbagi menjadi beberapa kategori yakni pembangunan drainase baru, rehabilitasi drainase lama, dan perawatan rutin. Upaya meningkatkan efektivitas penanganan drainase ditunjukkan dengan adanya sistem anggaran swakelola atau dana perawatan rutin yang digunakan untuk menangani drainase yang tidak berfungsi secara optimal.

Produktivitas organisasi juga dapat dilihat pada capaian kinerja organisasi. Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2024, diketahui bahwa capaian target jumlah drainase dalam kondisi baik mengalami penurunan. Penurunan presentase drainase dalam kondisi baik ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa masih banyak wilayah di Kabupaten Kudus yang belum memiliki sistem drainase yang memadai atau bahkan belum terbangun sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan capaian tidak hanya disebabkan oleh kerusakan drainase yang ada, tetapi juga karena keterbatasan pembangunan saluran baru. Salah satu alasan utama yang diungkapkan oleh para informan adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan

untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase. Dana yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan di wilayah yang terus berkembang. Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa Dinas PUPR sudah memiliki arah kerja dan komitmen dalam membangun saluran drainase secara bertahap namun realisasinya sangat bergantung pada alokasi dana, baik dari APBD, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) maupun bantuan provinsi.

## **2. Kualitas Pelayanan**

Menurut (Sudarmanto dalam Syafril & Sulandari, 2018) kualitas pelayanan mengukur sejauh mana suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai atau memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan adanya pembangunan drainase karena sebelumnya daerah mereka setiap tahunnya sering kali terendam banjir saat musim penghujan datang. Namun pada tahun 2024 banjir sudah mulai berkurang di ruas jalan perempatan jember yaitu perempatan yang merupakan titik pertemuan antara Jalan Sunan Kudus dan Jalan KHR Asnawi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proyek pembangunan drainase yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak

positif yang signifikan terhadap pengurangan genangan air yang pada akhirnya mengurangi risiko terjadinya banjir. Meskipun genangan air mulai berkurang di beberapa titik di ruas jalan Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa keluhan terkait drainase yang perlu diperhatikan lebih lanjut yaitu pada aspek perawatan rutin karena seringkali saluran drainase tersumbat oleh sampah.

Kualitas pelayanan juga berkaitan dengan kompetensi pelaksana. Pada pengelolaan drainase, pembangunan dan rehabilitasi drainase di serahkan kepada pihak ketiga. Namun untuk kegiatan perawatan rutin pada drainase tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Pasca pelaksanaan pembangunan drainase, sering kali masih ditemukan permasalahan berkaitan dengan jalan ambles dan penataan *paving block* yang mudah lepas dan kurang rapi. Berdasarkan observasi penulis di lapangan dan melalui hasil wawancara bersama masyarakat, pemasangan *paving block* yang dilakukan pasca pembangunan drainase justru menimbulkan persoalan baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Kudus dapat dipahami bahwa kerusakan pada proyek drainase yang terjadi setelah pembangunan selesai dilakukan, sebagian besar disebabkan oleh mutu pekerjaan yang kurang baik dari

pihak ketiga atau kontraktor pelaksana. Namun Dinas PUPR juga telah memiliki jaminan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan adanya masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Apabila dalam kurun waktu masa pemeliharaan terdapat mutu pekerjaan yang kurang baik maka pihak ketiga berkewajiban untuk memperbaiki.

### 3. Responsivitas

Responsivitas menurut (Dwiyanto et al., 2012) adalah kemampuan daya tanggap suatu lembaga publik dalam merespon keluhan, kebutuhan dan masalah yang ada dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai kecepatan dinas PUPR dalam merespon keluhan dan aduan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus merespon aduan terkait permasalahan drainase dengan cepat dan tepat, namun dalam perbaikannya tetap mempertimbangkan tingkat urgensi dan kewenangan drainase yang dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan kanal aduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan kritik maupun pengaduan. Meskipun saluran digital telah tersedia, namun masih banyak masyarakat yang

lebih memilih untuk menyampaikan aduan secara langsung dengan datang ke kantor atau melalui surat.

Dinas PUPR Kabupaten Kudus menunjukkan adanya praktik yang baik dalam pelibatan masyarakat khususnya pada tahapan awal sebelum pembangunan drainase dimulai. Praktik tersebut diwujudkan dalam dilaksanakannya kegiatan *Pre-Construction Meeting* (PCM) atau bisa disebut juga dengan rapat pra konstruksi yang menjadi bentuk konkret dari upaya mewujudkan *responsivitas* organisasi publik dalam mengenali dan merespons kebutuhan, aspirasi, serta mengenali dampak terhadap masyarakat sekitar.

### 4. Responsibilitas

Menurut (Dwiyanto dalam Konserinus Flota & Albab, 2023) responsibilitas atau tanggungjawab adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana proses pelayanan publik dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip administrasi serta organisasi yang telah ditetapkan secara resmi dan benar.

Tahapan yang mencerminkan adanya *responsibilitas* adalah kegiatan *uitzet*, yaitu pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kondisi dilokasi

pembangunan. Tahapan *uitzet* ini menjadi bukti bahwa Dinas PUPR tidak asal melaksanakan proyek, tetapi menjalankan proses verifikasi teknis sebagai bentuk kontrol. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan sebelumnya.

Berkaitan dengan aspek administratif, Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan telah dituangkan secara lengkap dalam kontrak kerja dengan pihak ketiga. Kontrak tersebut telah mencakup dokumen-dokumen penting seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis (Spektek) yang menjadi acuan bersama antara dinas dan penyedia jasa. Dari sisi mutu teknis, Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dengan menegaskan bahwa seluruh item pekerjaan, khususnya dalam pembangunan drainase telah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), baik dalam penggunaan material seperti RCP (*Reinforced Concrete Pipe*) maupun dalam pengujian kualitas material di *laboratorium (green test)*.

Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga telah memiliki langkah prosedur dalam menangani konflik yang melibatkan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan

Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah dengan upaya membuat saluran baru di sebelah saluran yang tertutup warga. Namun apabila hal tersebut dinilai tidak efisien maka langkah selanjutnya yang diambil oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan prosedur pembongkaran yang berbasis surat menyurat resmi. Misalnya yaitu memberi surat teguran, surat peringatan, dan yang terakhir yakni surat pembongkaran. Dinas PUPR Kabupaten Kudus tidak serta-merta melakukan tindakan pembongkaran secara sepihak, namun dinas berusaha untuk tetap menjalankan mekanisme formal yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan.

## 5. Akuntabilitas

Menurut (Asmawanti et al., 2020) akuntabilitas adalah suatu bentuk atau upaya pertanggungjawaban, baik secara individu maupun oleh lembaga atau instansi pemerintah, atas wewenang administrasi yang telah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan drainase terlihat dari adanya sistem pelaporan dan dokumentasi yang dilakukan secara rutin oleh setiap unit kerja. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan

termasuk pekerjaan di lapangan seperti pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase selalu didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala kepada atasan, baik mingguan maupun bulanan. Laporan-laporan ini menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dapat diakses melalui website resmi milik Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Melalui LKjIP, Dinas PUPR Kabupaten Kudus mempertanggungjawabkan sejauh mana target-target kinerja di bidang pengelolaan drainase tercapai, apakah sesuai dengan rencana strategis atau masih terdapat kendala di lapangan.

Akuntabilitas juga dapat diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi kepada publik. Namun pada realitanya, keterbukaan informasi pada website Dinas PUPR Kabupaten Kudus masih perlu untuk ditingkatkan karena berita maupun data yang ada masih belum diperbarui secara rutin.

## **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase**

### **1. Faktor Personal**

Faktor personal merupakan faktor yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung

kinerja suatu organisasi. Faktor ini mencakup kemampuan, motivasi, kepribadian, nilai, dan sikap seseorang dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan kompetensi dan jenjang pendidikan pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Namun meskipun pegawai di bidang tata bangunan dan drainase memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin.

Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat dihadapkan dengan kondisi mendesak seperti saluran tersumbat yang menyebabkan kemacetan atau genangan air yang mengganggu aktivitas warga, para pegawai tetap berupaya hadir dan menangani permasalahan tersebut secepat mungkin. Komitmen ini tercermin dari kesediaan mereka bekerja lembur, bahkan hingga malam hari untuk memastikan kondisi di lapangan dapat segera tertangani.

### **2. Faktor Kepemimpinan**

Fungsi dari kepemimpinan pada organisasi itu penting karena kepemimpinan adalah bagian tersendiri

dalam manajemen (Fauzi et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang dalam hal ini Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase memainkan peran yang penting dalam membangun motivasi dan semangat kerja staf. Pemimpin telah berusaha untuk menanamkan nilai integritas kepada para stafnya.

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase menekankan bahwa pekerjaan di dinas PUPR bukan sekadar rutinitas saja, melainkan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pemimpin juga mampu memberikan arahan kepada para bawahannya. Salah satu bentuk arahan konkret yang diberikan oleh pimpinan adalah instruksi kepada seluruh staf agar ponsel aktif selama 24 jam. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pekerjaan di bidang drainase bersifat dinamis dan sering kali bersinggungan langsung dengan kejadian tak terduga, terutama saat musim penghujan tiba.

### **3. Faktor Tim**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa budaya kerja di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kudus mencerminkan adanya kebersamaan, rasa tanggung jawab dan koordinasi yang telah berjalan dengan baik antar pegawai. Meskipun setiap individu memiliki pembagian tugas yang sudah

ditetapkan namun dalam praktiknya para pegawai tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, para pegawai justru membangun suasana kerja yang saling mendukung dan terbuka satu sama lain.

Selain itu untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan maka terdapat upaya pengawasan atau evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR khususnya Bidang Tata Bangunan dan Drainase. Evaluasi kinerja dilaksanakan hampir setiap bulan melalui berbagai bentuk forum internal, seperti rapat bidang, rapat koordinasi, dan rapat staff. Pada pelaksanaan rapat tersebut, masing-masing bagian menyampaikan progres kerja, membahas kendala, serta menyusun rencana kerja untuk hari, minggu, hingga bulan berikutnya.

### **4. Faktor Sistem**

Faktor sistem mencakup berbagai elemen seperti sistem perencanaan, sistem penganggaran, sarana dan prasarana, serta sistem informasi manajemen yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam bidang drainase tidak bisa dilepaskan dari persoalan anggaran yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Menurut (Achmad et al., 2024) prosedur birokrasi yang kompleks dalam pencairan anggaran sering kali menyebabkan keterlambatan

dalam pelaksanaan program yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan.

Upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur drainase di Kabupaten Kudus sangat bergantung pada alokasi anggaran. Pada praktiknya, anggaran yang tersedia di Dinas PUPR tidak hanya dialokasikan untuk drainase, tetapi juga harus dibagi dengan program-program lain seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta talut. Akibatnya, persoalan genangan air yang diakibatkan oleh sistem drainase yang belum tertangani secara menyeluruh tidak bisa diselesaikan secara optimal setiap tahun.

Keterbatasan fasilitas juga menjadi tantangan dan hambatan kinerja dinas PUPR Kabupaten Kudus. Keterbatasan peralatan ini yaitu pada ketersediaan mobil pick up dan becak motor, serta ketersediaan material seperti batu kali, semen, dan pasir. Hal inilah yang seringkali menyebabkan penanganan aduan menjadi lambat dan menyebabkan terjadinya antrean penanganan.

Salah satu faktor lain yang juga turut mempengaruhi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi drainase. Masyarakat masih menganggap saluran drainase sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga seperti

air cucian, limbah kamar mandi, bahkan sampah padat seperti serabut kelapa, guling, hingga popok sekali pakai. Selain itu, seringkali juga ditemukan tindakan warga yang menutup saluran drainase untuk akses pribadi tanpa berkoordinasi dengan dinas PUPR Kabupaten Kudus sehingga air tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase dan menyebabkan banjir maupun genangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi lapangan dan data dari dokumen yang telah dianalisis pada penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase sebagai Strategi Pencegahan Banjir cukup berjalan optimal. Hal ini dapat terlihat pada indikator kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Pada aspek produktivitas Dinas PUPR Kabupaten Kudus dikatakan belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga pembangunan dan rehabilitasi drainase belum tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Pada capaian target kualitas drainase juga menunjukkan adanya penurunan persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya dan masih

banyak drainase yang belum terbangun di beberapa wilayah.

Kualitas pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan juga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat karena masih terdapat kendala terkait kualitas hasil pekerjaan seperti kondisi jalan ambles dan pemasangan *paving block* yang kurang rapi. Hambatan lain yang ditemukan dalam pengelolaan drainase yaitu berkaitan dengan pemeliharaan rutin pada saluran drainase karena masih banyak ditemukan sampah yang menjadi penyebab tersumbatnya drainase.

Responsivitas yang baik dalam menangani masalah drainase telah ditunjukkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu dengan penanganan yang cepat pada keluhan mendesak dan mengedepankan sistem penanganan prioritas. Kecepatan tanggap Dinas PUPR terlihat dari kemampuan mereka merespon keluhan masyarakat dengan cepat, di mana penanganan masalah sederhana dapat dilakukan dalam hitungan jam hingga hari. Dinas PUPR Kabupaten Kudus juga telah menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti website, media sosial, dan aplikasi pengaduan resmi. Dalam hal pelibatan masyarakat, Dinas PUPR secara aktif mengadakan *Pre-Construction Meeting (PCM)*.

Dinas PUPR Kabupaten Kudus telah menunjukkan responsibilitas yang baik yaitu dengan menjalankan setiap proses sesuai prinsip administrasi dan kebijakan organisasi. Setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi resmi seperti SOP, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan Spesifikasi Teknis. Dinas PUPR juga telah menerapkan prosedur mediasi bertahap serta mekanisme surat menyurat sebelum tindakan pembongkaran dilakukan

Akuntabilitas di Dinas PUPR Kabupaten Kudus sudah cukup berjalan baik, terutama dalam hal pelaporan kinerja yang dibuktikan dengan adanya dokumen LKjIP. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek keterbukaan informasi kepada publik yaitu karena belum diperbaruinya informasi di media sosial dan *website*, khususnya oleh Bidang Tata Bangunan dan Drainase.

Pada penelitian ini juga ditemukan adanya penghambat pada kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam pengelolaan drainase yaitu faktor sistem yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase sehingga masih ditemukan masalah

penyumbatan sampah. Sedangkan faktor pendorong kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus yaitu faktor personal yang dibuktikan dengan adanya komitmen yang kuat oleh para pegawai. Faktor kepemimpinan yang baik juga ditunjukkan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase dengan memberikan arahan, motivasi, dan dukungan khususnya saat menghadapi kondisi mendesak. Selain itu faktor tim juga turut menjadi faktor pendorong karena terdapat sikap pegawai yang saling mendukung, serta kesediaan untuk saling mengingatkan dan membantu jika terdapat kendala.

## **SARAN**

Setelah melalui serangkaian penelitian dan analisis mendalam, berikut saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kudus dalam Pengelolaan Drainase.

1. Untuk meningkatkan produktivitas Dinas PUPR Kabupaten Kudus diperlukan sistem monitoring terhadap kondisi drainase secara berkala. Hal ini dilakukan agar dapat membantu mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga perbaikan dapat dilakukan tepat waktu sebelum permasalahan drainase semakin besar sehingga dapat menekan penggunaan anggaran.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan drainase, Dinas PUPR Kabupaten Kudus perlu memperketat pengawasan pada kualitas pekerjaan selama proses pembangunan misalnya pada teknis pelaksanaan pemasangan *paving block* dan pengerasan jalan. Perlu dilakukan evaluasi yang lebih ketat dalam pemilihan pihak ketiga atau kontraktor yang akan mengerjakan proyek drainase.
3. Dinas PUPR Kabupaten Kudus perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan rutin memperbarui konten di media sosial dan website, terutama dari Bidang Tata Bangunan dan Drainase. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan jadwal rutin dan penanggung jawab khusus agar informasi selalu terupdate dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
4. Pengelolaan drainase di Kabupaten Kudus memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara Dinas PUPR, DLHK, Dinas Perumahan dan Permukiman, pemerintah desa, serta masyarakat. Sinergi ini penting untuk memastikan saluran tetap bersih, berfungsi optimal, dan mampu mengurangi risiko genangan secara berkelanjutan.

5. Dinas PUPR perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi drainase dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, maupun tokoh masyarakat serta memanfaatkan media sosial melalui kampanye (*campaign*) agar kesadaran masyarakat meningkat dan mengurangi kebiasaan membuang sampah pada saluran drainase.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., Wilayah, K., Agama, K., & Maluku, P. (2024). *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Volume : 10 No . 02 Edisi Desember 2024 Efektivitas Perencanaan Anggaran di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Kinerja Layanan Keagamaan. 02*, 227–245.
- Afrizal, D., Anisa, D., Khaliq, M., & Yusrizal, D. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60–67.  
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1864>
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.  
<https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- Andani, D. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 101–112.  
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1494>
- Anjasmari, N. M. M., & Nor'aini, N. (2023). Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Uppd) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2163–2171.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1030>
- Bahiroh, E. (2024). *Manajemen Kinerja*. 1–71.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2012). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, F., Wardi, Y., & Thaib, I. (2023). Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan: Systematic Literature Review. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(2), 156–165.  
<https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.4632>
- Ferine, K. F. (2024). *Pengukuran Kinerja SDM*. Selat Media Patners.
- Fitrianti, B., Heriyanto, M., & Andri, S. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 2118–2128.
- Grasia, E., Kismartini, & Maesaroh.

- (2023). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3, 178–192.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* (1st ed.). Penerbit Gava Media.
- Konserinus Flota, M., & Albab, U. (2023). *Kajian Tentang Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan)* (Studi Kasus Pada Subdit Iii/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur). 3, 851–860. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7488/3548>
- Mahmudi, S. E. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). [https://career.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3955&keywords=](https://career.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3955&keywords=)
- Leilasariyanti, Y. (2025). *Manajemen Kinerja*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sameldi, P. (2020). *Evaluasi Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Perbaikan Dreinase Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syafril, S., & Sulandari, S. (2018). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1, 65–81.